



SALINAN

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA BANDUNG

NOMOR: KD/27-Bapemperda/XII/2021

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KOTA BANDUNG TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Bandung Nomor: KD/23/Bapemperda/XII/2021, tanggal 26 November 2021;
- b. bahwa dalam Diktum KEEMPAT Keputusan DPRD Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bapemperda diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang dapat dimasukkan kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2022 untuk menambah Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya yang hanya memuat kumulatif terbuka berupa Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat wajib;
- c. bahwa Bapemperda berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan rapat kerja dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung dan telah menyepakati tambahan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor: KD/23/Bapemperda/XII/2021 perlu diubah dan ditetapkan kembali;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2022;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 67);

Memperhatikan :

1. Surat Wali Kota Bandung Nomor Hk.01.01/6936-Bagkum/XI/, hal Penyampaian Usulan Propemperda Tahun 2022, dan Surat Wali Kota Bandung Nomor Hk.01.01/7734-Bagkum/XII/2021, hal Penyampaian Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2022;
2. Laporan Bapemperda tentang Usulan Propemperda Tahun 2022 pada Rapat Paripurna; dan
3. Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung tanggal 29 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2022.
- KEDUA** : Daftar Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DPRD Kota Bandung Nomor: KD/23/Bapemperda/XII/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2021
KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

ttd

H. TEDY RUSMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,

H.M. SALMAN FAUZI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19671103 198603 1 001

SALINAN LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kota Bandung
NOMOR: KD/27-Bapemperda/
XII/2021 tentang Perubahan
Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kota Bandung Tahun
2022

DAPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
YANG AKAN DIBAHAS DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2022

No.	JUDUL RAPERDA	USULAN
1	2	3
1.	Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Penyakit menular Berpotensi Wabah	Propemperda Tahun 2021
2.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Propemperda Tahun 2021
3.	Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Propemperda Tahun 2021
4.	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Propemperda Tahun 2021
5.	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Propemperda Tahun 2021
6.	Bangunan Gedung	Propemperda Tahun 2021
7.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2021	Pemerintah Kota Bandung (Badan Keuangan dan Aset Daerah)
8.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2022	Pemerintah Kota Bandung (Badan Keuangan dan Aset Daerah)
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2023	Pemerintah Kota Bandung (Badan Keuangan dan Aset Daerah)
10.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Kota Bandung (Badan Keuangan dan Aset Daerah)
11.	Pemajuan Kebudayaan	Pemerintah Kota Bandung (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

1	2	3
12.	Pelayanan Pemakaman Umum	Pemerintah Kota Bandung (Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang)
13.	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	DPRD Kota Bandung (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)
14.	Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	DPRD Kota Bandung (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)
15.	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024	Pemerintah Kota Bandung (Badan Keuangan dan Aset Daerah)

KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

ttd

H. TEDY RUSMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA BANDUNG,



H.M. SALMAN FAUZI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19671103 198603 1 001